



Implementation of Cambridge Curriculum in Islamic Elementary Schools

Hidayatulloh et. al^{1*}

¹Program Studi Manajemen Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Background: Curriculum development is a key factor in improving the quality of education, particularly in Islamic schools that are adapting to global standards. **Specific Background:** The Cambridge Curriculum has been adopted in several Islamic schools in Indonesia to enhance learning outcomes and align with international benchmarks. **Gap:** However, limited studies have explored how this curriculum is implemented in Islamic contexts, especially in relation to challenges faced by schools. **Aim:** This study aims to describe the implementation of the Cambridge Curriculum in an Islamic elementary school and identify the obstacles encountered. **Results:** The findings reveal that while the curriculum introduces modern teaching strategies and enriches learning experiences, its implementation is hindered by limited teacher capacity, insufficient resources, and difficulties in student adaptation. **Novelty:** This study highlights the integration of an international curriculum with Islamic values, offering insights into contextual adaptation in local educational settings. **Implications:** The results provide practical recommendations for policymakers and school administrators in managing curriculum innovation, while contributing to the academic discourse on curriculum globalization in Islamic education.

Keywords: Cambridge Curriculum; Islamic education; Curriculum implementation; Teacher capacity; Student adaptation.

OPEN ACCESS

ISSN 2723 3774 (online)

Edited by:

Puspita Handayani

Reviewed by:

Biyanto Biyanto

Furqan Mawardi

**Correspondence:*

Hidayatulloh

hidayatullah@umsida.ac.id

Received: 01 July 2025

Accepted: 19 July 2025

Published: 01 August 2025

Citation:

Hidayatulloh

(2025) Implementation of

Cambridge Curriculum in Islamic

Elementary Schools

Journal of Islamic and Muhammadiyah Study.7:2.

doi: 10.21070/jims.v7i2.1631

INTRODUCTION

Dalam sejarah perkembangan gerakan pembaharuan di Indonesia Muhammadiyah menjadi salah satu gerakan pembaharuan yang sangat penting. Muhammadiyah sering disebut juga sebagai gerakan pembaharuan. Muhammadiyah itu sendiri merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang berfokus pada dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid melalui upaya menyeluruh menurut Muhammad Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban dalam [1]. Salah satu gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah gerakan dibidang pendidikan. Menurut Ahmad Syafii Maarif yang dikutip oleh C. Syaifuddin [2] bahwa Signifikansi gerakan pendidikan Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari pandangan Ahmad Dahlan, yang menyakini bahwa pendidikan menjadi fokus utama dalam proses pembangunan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah telah mendirikan sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan pendidikan muhammadiyah ini juga terjadi di Kecamatan Taman yang didirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang. Hingga saat ini pendidikan Muhammadiyah di Kecamatan Taman berjumlah delapan satuan pendidikan, yaitu 3 SD, 1 SMP, 1 MTs, 1 SMA, 2 SMK.

Upaya peningkatan mutu pendidikan Muhammadiyah di Kecamatan Taman terus dilakukan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang. Pendidikan Muhammadiyah di Sepanjang menerapkan 8 Standar Nasional Pendidikan [3]. Salah satu yang terkait dengan penelitian ini adalah standar pengelolaan. Pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah yang ada di Sepanjang telah dikembangkan dengan menggunakan sistem informasi. Pengembangan tata kelola keuangan berbasis sistem informasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam administrasi keuangan sekolah secara simultan [4] [5]. Menurut Sabarno yang dikutip oleh J. Tandililing [6] menjelaskan transparansi adalah elemen pokok dalam mencapai tata kelola keuangan yang baik. Keberhasilan tata kelola keuangan yang baik membutuhkan keterbukaan, partisipasi, dan akses mudah bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan akses informasi terhadap tata kelola keuangan memiliki dampak positif pada pencapaian berbagai indikator lainnya. Akuntabilitas, dalam konteks ini, merupakan bentuk tanggung jawab dengan menjelaskan manajemen organisasi kepada pihak yang memberikan tanggung jawab [7] [8] [9]. Sehingga peran kepala sekolah sebagai perencana anggaran harus dapat memahami manajemen keuangan sekolah terumata dalam pengelolaan semua kebutuhan sekolah [10].

Pengelolaan pendidikan atau tata kelola pendidikan merupakan serangkaian proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, hingga

penilaian, yang bertujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Indrawati et. al. menyampaikan bahwa manajemen keuangan sekolah merupakan serangkaian proses yang mengatur secara sistematis tentang keuangan sekolah, yang meliputi tahap perencanaan, pencatatan keuangan, pengeluaran dana, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah [11]. Sebuah pengelolaan keuangan dapat dikatakan sangat baik salah satunya bersumber pada asas-asas pengelolaan keuangan itu sendiri [12]. Misbah menjelaskan tujuan pengelolaan keuangan sekolah adalah untuk meminimalisir kecurangan dan manipulasi data keuangan, tujuan tersebut mengupayakan agar menghindari serangkaian konflik kepentingan yang muncul didalam organisasi yang akan mendorong kearah berkelanjutan [13] [14]. Dengan demikian, tata kelola dapat diartikan sebagai rangkaian langkah yang dimulai dari perencanaan tujuan, organisasi kegiatan yang sudah direncanakan, pengarahan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan, pengawasan sebagai alat kontrol, dan evaluasi sebagai hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.

Dalam konteks sekolah, peran tata kelola sangat penting agar proses pendidikan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh sistem yang dikembangkan oleh sekolah. Mulyasa menjelaskan lembaga pendidikan yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, karena terdapat masalah keuangan, baik dari sistem penggajian guru maupun pengadaan sarana prasarana pendidikan [15].

Pada era globalisasi dan dinamika bisnis yang terus berkembang, tata kelola keuangan menjadi unsur krusial dalam menjamin keberlanjutan dan daya saing lembaga pendidikan. Sehingga menurut wijaya yang dikutip oleh A. R. D. Hasibuan [16] tidak dipungkiri sebuah lembaga tersebut akan melakukan berbagai upaya untuk menjamin standarisasi tata kelola keuangan. Pengelolaan keuangan di setiap lembaga pendidikan sangat bervariasi, ada yang menggunakan sistem informasi dan ada menggunakan sistem yang manual dan sederhana. Sekolah dengan dukungan keuangan masyarakat yang rendah cenderung mengadopsi pendekatan sederhana dalam pengelolaan keuangannya. Di sisi lain, pada sekolah yang didukung oleh masyarakat dengan keuangan yang lebih besar, pengelolaan keuangan menjadi lebih kompleks. Hal ini menciptakan tuntutan kepada lembaga pendidikan untuk menunjukkan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kehadiran sistem informasi keuangan dan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang keuangan menjadi sangat penting karena akan membantu dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu [17]. Mengingat kompleksitas dan rincian yang terlibat dalam proses tersebut, orang yang bertanggung jawab atau bekerja di bidang keuangan sebaiknya memiliki kompetensi yang terbukti. Sehingga Kepala Sekolah memiliki peranan penting dalam mengelola keuangan dan mampu membina karyawan agar

menjalankan fungsinya secara optimal sehingga dapat mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien [18].

Dalam konteks lembaga pendidikan, tata kelola keuangan berbasis sistem informasi memegang peran sentral dalam menjamin kelangsungan operasional dan peningkatan kualitas pendidikan [19] [20]. Penerapan teknologi informasi, terutama sistem informasi, telah mengubah cara lembaga sekolah mengelola dan melacak sumber daya keuangan mereka. Salah satu dampak positif dari penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi [21]. Selanjutnya adanya sistem informasi memungkinkan otomatisasi pekerjaan dan penerapan pelayanan yang baik [22]. Menurut Willett, M. S., Andrew, et. Al perkembangan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga berkesinambungan [23], selain itu juga membuka peluang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan strategis. Ketika sebuah informasi terkait kinerja akademik, program pendidikan, dan pemanfaatan sumber daya disampaikan secara terbuka, lembaga pendidikan menjadi lebih bertanggungjawab atas hasil yang dicapai [24]. Keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya tergantung pada aspek pendidikan, tetapi juga pada kemampuannya mengelola keuangan dengan baik untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan agar membentuk citra positif pada sebuah lembaga pendidikan [25].

Tantangan khusus di dalam lingkungan pendidikan, seperti anggaran terbatas, kebutuhan pelatihan staf administrasi, dan kebutuhan untuk memprioritaskan sumber daya [26], memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem informasi dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Penelitian ini akan fokus pada identifikasi solusi konkret yang dapat membantu lembaga sekolah mengintegrasikan sistem informasi dengan baik dalam tata kelola sistem keuangan mereka, mengatasi kendala spesifik yang mungkin dihadapi oleh lembaga pendidikan. Dengan merinci permasalahan yang ada dan mengeksplorasi solusi yang berfokus pada kebutuhan lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan lembaga sekolah.

Tata kelola keuangan di SD Muhammadiyah 1 Taman mengikuti kebijakan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang serta menyesuaikan dengan pedoman pengelolaan keuangan sekolah yang diterbitkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Tata kelola keuangan di SD Muhammadiyah 1 Taman telah menggunakan sistem informasi tata kelola keuangan bernama SIASMU (Sistem Informasi Akuntansi Sekolah Muhammadiyah). Aplikasi SIASMU dibuat secara mandiri oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang. Fungsi aplikasi bertujuan untuk dapat mempermudah dalam mengelola keuangan sekolah, mulai dari penerimaan sampai pengeluaran. Bahkan di sistem ini juga terdapat fitur untuk pengelolaan aset. Hasil akhirnya sistem ini

dapat menentukan nilai aset di suatu instansi atau lembaga sekolah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola keuangan yang diterapkan di SD Muhammadiyah 1 Taman yang memanfaatkan sistem informasi di dalam tata kelola keuangan yang berkualitas dan transparan.

METHOD

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data di lapangan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti [27]. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam data primer peneliti menggunakan informasi langsung yang didapat dari lapangan sesuai dengan topik pembahasan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah SD Muhammadiyah 1 Taman, serta bendahara dan staff keuangan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari pengumpulan data melalui dokumen atau pengamatan [28]. Data yang telah diperoleh baik dari sumber data primer maupun data sekunder akan di kombinasikan untuk diteliti dengan tetap mengutamakan substansi data primer. Teknik pengumpulan data melalui observasi secara langsung datang ke sekolah dan mengadakan wawancara kepada informan terkait dengan tata kelola keuangan SD Muhammadiyah 1 Taman yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana yang dikutip oleh Rival dan Sampara [29], analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama pengumpulan data maupun setelah proses pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa analisis data kualitatif melibatkan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data meliputi pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, atau transformasi data dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Penyajian data adalah proses pengorganisasian dan penyatuan informasi sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data membantu memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan, termasuk analisis lebih mendalam atau tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Penarikan kesimpulan adalah aktivitas analisis penting ketiga, di mana peneliti mulai mencari makna dari data yang dikumpulkan, mencatat pola, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai seluruh data terkumpul, tergantung pada jumlah dan kompleksitas catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, metode pencarian ulang yang digunakan, keahlian peneliti, dan tuntutan pemberi dana.

Selanjutnya dari keseluruhan data yang diperoleh

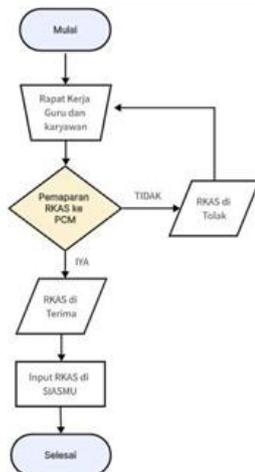
dari berbagi sumber akan dideskripsikan untuk menjadi hasil penelitian. Adapun penelitian ini akan diambil dari Bendera Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang, staff keuangan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, panitia kegiatan SD Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Penelitian ini bertempat di SD Muhammadiyah 1 Taman dengan alamat di Jalan Raya Bebekan 269 Taman, Sidoarjo.

RESULT AND DISCUSSION

Tata kelola keuangan yang di terapkan oleh SD Muhammadiyah 1 Taman mengikuti pedoman tata kelola keuangan yang dibuat oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang, yang diadaptasi dari pedoman Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur nomor: 1427/PED/II.0/C/2019 tentang pengelolaan keuangan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren Muhammadiyah Jawa Timur. Kebijakan tata kelola keuangan yang diterbitkan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang menerapkan semi sentralisasi, dimana dana investasi dan pengembangan pendidikan dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang dengan tujuan untuk pengembangan sekolah-sekolah agar pengembangan di amal usaha bidang pendidikan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang bisa merata. Sementara untuk dana operasional dan kegiatan dikelola oleh masing-masing sekolah.

Tata kelola keuangan di SD Muhammadiyah 1 Taman terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu : perencanaan, penggunaan dana, pelaporan, dan audit setiap akhir periode kepala sekolah. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh M. Indawati E, Mulyati Irawati [11] tentang pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian proses mulai dari tahapan tersebut.

A. Perencanaan



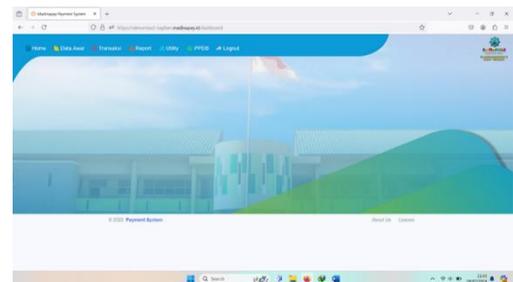
Flowchart 1. Perencanaan

Dalam perencanaan keuangan sekolah dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

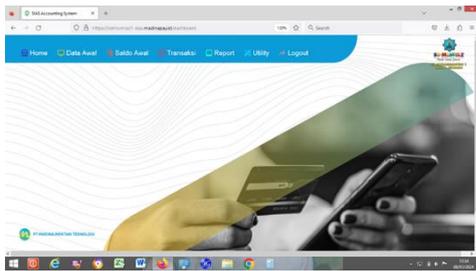
sekolah (RKAS), yang melibatkan unsur pimpinan sekolah dan seluruh guru karyawan. RKAS yang disusun memuat 8 standar Nasional Pendidikan yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Setelah draf RKAS tersusun, maka kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara sekolah memaparkan hasil penyusunan draf RKAS kepada Majelis Dikdasmen dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh SD Muhammadiyah 1 Taman, tetapi diikuti oleh seluruh amal usaha bidang pendidikan yang dinaungi oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang. Pemaparan hasil RKAS selain menjelaskan keuangan SD Muhammadiyah 1 Taman juga menjelaskan tentang program-program sekolah selama satu tahun ajaran yang akan datang dan juga program-program unggulan yang akan dilakukan oleh sekolah. Di Akhir kegiatan sekaligus dilakukan penetapan RKAS oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang. Hal tersebut dibenarkan oleh M. Effendi [25] bahwa keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya tergantung pada aspek pendidikan, tetapi juga pada kemampuannya mengelola keuangan dengan baik untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan agar membentuk citra positif pada sebuah lembaga pendidikan.

Setelah pengesahan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang, bendahara SD Muhammadiyah 1 Taman akan memasukkan RKAS kedalam sistem informasi tata kelola keuangan yang bernama Sistem Informasi Amal Usaha Muhammadiyah (SIASMU). Sejalan dengan yang disampaikan wijaya yang dikutip oleh A. R. D. Hasibuan [16] bahwa sebuah lembaga akan melakukan berbagai upaya untuk menjamin standarisasi tata kelola keuangan. Dengan adanya sistem informasi berbasis teknologi itu, maka definisi tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Mulyasa [17] agar memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Penerapan pelayanan yang berkualitas diharapkan mampu menjaga standarisasi tata kelola keuangan di masing-masing lembaga.

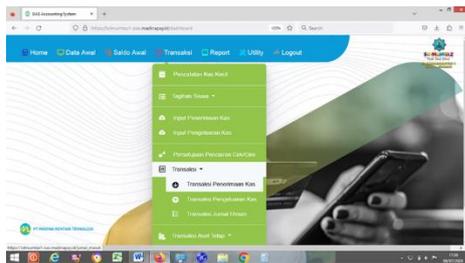


Gambar 1. Tampilan utama aplikasi Madina Pay



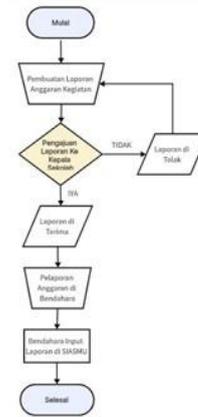
Gambar 2. Tampilan utama aplikasi SIASMU

SIASMU ini adalah sistem informasi tata kelola keuangan yang dibuat oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang. Aplikasi SIASMU dapat diakses secara online sehingga dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Dalam penggunaan sehari-hari aplikasi SIASMU dapat diakses oleh 3 pihak terkait, yaitu: Bendahara dan Staf keuangan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang, Kepala Sekolah, dan Bendahara Sekolah. Hal ini bertujuan agar tercipta sebuah sistem informasi keuangan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam tata kelola keuangan sekolah secara simultan. Sejalan yang disampaikan oleh W. M. Nazaruddin, I., & Putra [4] Salah satu upaya peningkatan mutu tersebut adalah mengembangkan tata kelola keuangan berbasis sistem informasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam administrasi keuangan sekolah secara simultan. Selain aplikasi SIASMU yang digunakan untuk tata kelola keuangan, terdapat pula aplikasi penerimaan keuangan yang dapat diakses oleh walimurid SD Muhammadiyah 1 Taman yaitu aplikasi Madina Pay. Aplikasi Madina Pay sudah terintegrasi dengan SIASMU dan dapat diakses secara online. Selain itu aplikasi Madina Pay juga terhubung dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank penerima pembayaran dengan fitur virtual account.



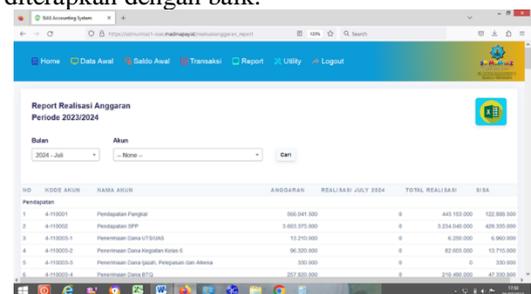
Gambar 3. Tampilan transaksi di aplikasi SIASMU

B. Penggunaan Dana



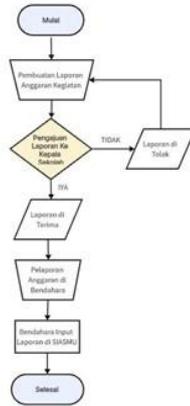
Flowchart 2. Penggunaan Dana

Proses pengajuan atau pencairan dana dalam melaksanakan program kerja SD Muhammadiyah 1 Taman melalui beberapa tahapan, yaitu: pengajuan anggaran dana kegiatan sekolah dilakukan oleh wakil kepala sekolah atau panitia kegiatan kepada Kepala Sekolah dengan membawa berkas pengajuan anggaran dana kegiatan sekolah untuk diperiksa dan disesuaikan dengan RKAS yang terdapat didalam aplikasi SIASMU. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah tahapan berikutnya adalah melakukan pencairan dana ke bendahara sekolah sesuai dengan arahan dari kepala Sekolah dan aplikasi SIASMU. Tahapan berikutnya bendahara sekolah akan melakukan penarikan dana ke bank untuk selanjutnya dana tersebut diberikan ke wakil kepala sekolah atau panitia kegiatan. Penggunaan dana oleh wakil kepala sekolah dan panitia kegiatan harus sesuai dengan RKAS dan pengajuan anggaran yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Dalam hal ini tidak selaras dengan pendapat Y. S. Tileng, K. G [30] bahwa kemajuan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi penggunaannya dengan menyediakan berbagai fasilitas dan digitalisasi informasi. Seharusnya proses pengajuan dana sudah bisa terakomodir oleh sistem informasi SIASMU secara online oleh masing-masing bidang tanpa melakukan pengajuan secara manual ke bendahara sekolah. Sehingga efisiensi dalam pekerjaan bisa diterapkan dengan baik.



Gambar 4. Tampilan report di aplikasi SIASMU

C. Pelaporan



Flowchart 3. Pelaporan

Pelaporan kegiatan dan penggunaan dana dilakukan oleh wakil kepala sekolah dan panitia kegiatan sekolah kepada bendahara sekolah. Proses tersebut dilakukan dengan menyerahkan berkas pelaporan kegiatan dan penggunaan dana sekolah yang telah dijalankan. Selanjutnya, bendahara memasukkan hasil laporan kegiatan sekolah ke aplikasi SIASMU agar selalu update dan dapat di pantau oleh kepala sekolah, bendahara, dan staf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang. Pelaporan di aplikasi SIASMU dengan tepat waktu sangat penting, karena dalam setiap kegiatan nantinya akan muncul laporan penggunaan anggaran dan saldo anggaran. Terdapat berbagai fitur tambahan pada aplikasi SIASMU diantaranya: penggajian guru karyawan, laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan dan laporan keuangan.

D. Audit

Untuk mengukur kinerja keuangan sekolah dalam periode kepemimpinan kepala sekolah, maka Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang menetapkan kebijakan audit keuangan sekolah di akhir periode kepemimpinan kepala sekolah. Audit keuangan sekolah ini dilakukan oleh Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo atas permohonan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang. Hasil dari audit keuangan sekolah yang dilakukan oleh LPPK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo dikirim ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor LPPK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo.

CONCLUSION

Tata kelola keuangan yang baik, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, adalah kunci untuk mencapai manajemen keuangan yang efektif di lembaga pendidikan. SD Muhammadiyah 1 Taman telah menerapkan sistem informasi akuntansi sekolah yang disebut SIASMU untuk mempermudah pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di sekolah ini sudah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kebijakan tata kelola keuangan yang diterbitkan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang menerapkan semi sentralisasi, dimana dana investasi dan pengembangan pendidikan dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang dengan tujuan untuk pengembangan sekolah-sekolah agar pengembangan di amal usaha bidang pendidikan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang bisa merata. Sementara untuk dana operasional dan kegiatan dikelola oleh masing-masing sekolah.

Namun, dalam praktiknya, masih ada beberapa tahapan yang belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi, seperti pengajuan dan pelaporan dana kegiatan yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan seluruh proses ke dalam sistem informasi guna mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik dan efisien.

REFERENCES

Handayani, I. P., & Faizah. (2020). Model gerakan dakwah keagamaan Muhammadiyah: Studi etnografi di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 103–116.

Syaifuddin, C. M. A., Anggraeni, H., Khotimah, P. C., & Mahfud. (2019). Sejarah sosial pendidikan Islam modern di Muhammadiyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–9.

Dariyo, A. A. (2023). Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan layanan pendidikan yang prima berskala nasional. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 137–145.

Nazaruddin, W. M. I., & Putra. (2020). Sistem akuntansi keuangan sekolah. *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMP Nasional Program*, 38, 442–447.

Ramadona, M. (2020). Peran pengelolaan keuangan sekolah: Transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(2), 29–34.

Tandililing, J. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah terhadap motivasi mengajar guru di Kabupaten Keerom. *Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan Daerah*, 4(2), 38–57.

Karmiyanti, N. K. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah terhadap partisipasi komite sekolah

- (Studi kasus pada SMP swasta se-Kecamatan Sukawati). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 42–66.
- Sawalni. (2019). Model akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah (Studi kasus: Sekolah Muhammadiyah di Malang Raya). *Ensiklopedia Jurnal*, 2(1), 196–203.
- Syafariah, A. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan sekolah menengah atas negeri se-Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, 2(2), 85–95.
- Myende, A., Samuel, M. A., & Pillay. (2018). Novice rural principals' successful leadership practices in financial management: Multiple accountabilities. *South African Journal of Education*, 38(2), 1–11.
- Indawati, E., & Mulyati. (2019). Pengelolaan keuangan sekolah (MPPKS-Keu). Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Martini, R., Zulkifli, Z., Hartati, S., & Armaini. (2018). Pembukuan dan pelaporan informasi akuntansi keuangan berbasis PSAK 45: Pada Panti Asuhan Al-Amanah, Palembang. *Aptekmas*, 1(2), 20–29.
- Hapsari, D. W., & Seta, A. N. S. (2020). Sudahkah dana sekolah dikelola dengan baik? *Jurnal Accounting, Finance, Taxation, Audit*, 1(2), 14–25.
- Sholeh, M. I. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam membangun citra positif melalui manajemen pendidikan yang berkualitas. *Tadbiruna*, 3(1), 43–55.
- Suhendra, E. S. (2019). Dampak akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme paedagogik terhadap kinerja guru di SMKN 21 Jakarta. *Jurnal Nusantara*, 4, 38–52.
- Hasibuan, A. R. D. (2021). Penerapan tata kelola keuangan pendidikan sekolah dasar pada akhir periode tahun 2020. *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(1), 304–309.
- Mulyasa. (2018). Bantuan operasional sekolah. (hlm. 34).
- Kaslin, S., & Rumisa, A. (2021). Strategi kepala sekolah dalam pembinaan profesionalisme guru. *Kelola: Jurnal Islamic Education Management*, 6(2), 123–136.
- Nurdiani, N. M. S., & Nugraha. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*.
- Heliani, E., Wahidin, D., & Susilawati. (2020). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah. *Jurnal Akuntansi Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(21), 12–21.
- Vidiasari, A., & Darwis, D. (2020). Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan kredit buku cetak (Studi kasus: CV Asri Mandiri). *Jurnal Madani Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Humaniora*, 3(1), 13–24.
- Damayanti, & Nirmalasari, N. (2020). Sistem informasi manajemen penggajian dan penilaian kinerja pegawai pada SMK Taman Siswa Lampung. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 6(4).
- Napu, S. F., & Supiah. (2019). Proses pengambilan keputusan strategik dalam penyusunan anggaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo. *Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 57–72.
- Wahyudin. (2021). Manajemen pembiayaan pendidikan (Pendekatan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas). Yogyakarta: Deepublish.
- Effendi, M. (2021). Pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan citra lembaga di lembaga pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(1).
- Julian, M. B. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi manajemen: Database, software dan brainware. *Academia Letters*, 11. https://www.academia.edu/44624460/Faktor_Faktor_Yang_Mempengaruhi_Sistem_Informasi_Manajemen_Database_Software_Dan_Brainware
- Amiruddin, Z. A. (2018). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusumastuti, A. M. K., & Adhi. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D.
- Rival, N., & Sampara, R. (2023). Implementasi program MBKM mandiri kewirausahaan mendorong minat wirausaha mahasiswa. *Indonesian Journal of Economic Management and Accounting*, 1(5), 391–399.
- Tileng, Y. S. K. G., Paramita, S., Tanamal, R., & Soekamto. (2021). Workshop pengenalan sistem informasi dan implementasi Soppada siswa-siswi SMA Rajawali Makassar. *Abdifomatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 1, 34–40.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that there was no conflict of interest in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Hidayatulloh. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which

does not comply with these terms